ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Skripsi Oleh :

ELITA PRATAMA

01031381419213

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama : Elita Pratama

NIM : 01031381419213

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam melanjutkan Ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua,

Tanggal

:_____

Ermadiani, S.E.,MM.,Ak
NIP:196608201994022001

Anggota,

Tanggal

:_____

Hj. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak
NIP: 197206062000032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama : Elita Pratama

NIM : 01031381419213

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 23 April 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 24 April 2018

Ketua	Anggota	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Hj. Relasari, S.E., M. Si., Ak	Eka Meirawati, S.E., M. Si., Ak
NIP . 196608201994022001	NIP . 197206062000032001	NIP . 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP . 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Elita Pratama
NIM	: 01031381419213
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Pembimbing

Ketua	: Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Anggota	: Hj. Rela Sari, S.E., M, Si., Ak
Tanggal Ujian	: 23 April 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri Dalam skripsi initidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 24 April 2018
Yang memberi pernyataan,

Elita Pratama
NIM . 01031381419213

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Janganlah kau menunda apa yang dapat kamu kerjakan sekarang, karena bila kamu menunda apa yang dapat kamu kerjakan sekarang, itu dapat membuat kamu kesulitan di kemudian hari"

" Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap."

(Qs. Al- Insyirah : 7-8)

" Tuntunlah ilmu, tapi jangan lah lupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupapada ilmu"

(Hasan Al Basri)

Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Orang Tua
- Saudara-saudaraku
- Sahabat Terbaikku
- Teman-temanku
- Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul "**Analisis Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang** ". Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berlangsung di Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku pengelola akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.

5. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta memberikan saran, dan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Hj. Rela Sari, S.E., M.Si.,** Akselaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. **Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak** selaku Dosen Penguji dalam Ujian Komprehensif.
8. **Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
10. **Meita Rahmawati, S.E., M. Acc** selaku Dosen yang memberikan arahannya di awal penulisan skripsi ini.
11. Kepada Pak Dim Yati dan Kak Zaf dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah, terimakasih atas dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
12. Untuk Ayah saya Rahmat dan ibu saya Ningyu, serta kakak saya edo, mba nana , uni desi, mba desi, kiki dan adik saya ary. Terima kasih telah menjadi alasan aku untuk hidup lebih baik lagi.
14. Sahabat, teman seperjuanganku selama kuliah, Tiara, Kurnia, Intan, Feny, Ulfa, Septa, Yesi, gege dan desri.

15. Untuk sahabat sebimbingan Tiara Patria Pratiwi , Prawira Akbar Putra dan Intan Yuni Damayanti, penulisan skripsi ini mungkin tidak selesai jika bukan karena arahan dari kalian. Terima Kasih atas support dan bantuan kalian.
16. Untuk geng kompre Intan Yuni Damayanti, Heru Septiadi dan Rian , banyak ilmu dan cerita telah kita lewati bersama. Semoga kita dapat berjumpa kembali saat kita sudah jaya. .
17. Seluruh teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, 24 April 2018

Elita Pratama

NIM. 01031381419213

ABSTRAK

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Oleh :

Elita Pratama

Pendapatan asli daerah dari pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di palembang, untuk mengetahui seberapa efektif dan efesien prosedurnya dan mengetahui bagaiamana upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara,dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian, pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah efektif walaupun di tahun 2016 tidak mencapai target yang diharapkan. Prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah bisa dikatakan efisien. Ini terbukti pada tahun 2015 telah mencapai target walaupun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang diharapkan. Tidak mungkin prosedur yang tidak efisien dapat menghasilkan penerimaan yang efektif. Untuk memaksimalkan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebaiknya BPPD kota Palembang melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih berminat meggunakan aset milik daerah dalam kegiatannya dan melakukan kunjungan ke daerah yang penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerahnya sudah sangat baik sekali.

Kata kunci *: retribusi pemakaian kekayaan daerah,efektivitas,efesiensi.*

Ketua

Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP . 196608201994022001

Anggota

Hj. Relasari, S.E., M. Si., Ak
NIP . 197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP . 197303171997031002

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF COLLECTING USER CHARGES FOR THE USE OF REGIONAL WEALTH IN EFFORT TO INCREAS THE REVENUE OF LOCAL INCOME IN THE TAX MANAGEMENT OF THE AGENCY PALEMBANG CITY

By :

Elita Pratama

The original revenue of the region from the collection of local resource usage is very influential on the regional revenue every year. The purpose of this study is to find out how the procedure of levying the use of local wealth in Palembang, to know how effective and efficient the procedure and to know how efforts to improve the acceptance of user charges for the use of local wealth. The type of this research is descriptive research. To obtain the necessary data the authors perform data collection activities by interview, documentation, and observation. The result of the research is that the collection of local resource usage fees has been effective even though in 2016 did not reach the expected target. The procedure of collecting user charges for the use of regional wealth can be said to be efficient. This is evident in 2015 has reached the target even though in 2016 did not reach the expected target. It is impossible that inefficient procedures can result in effective reception. To maximize the collection of user charges for the use of regional wealth should the Local Tax Management Agency of Palembang city shall socialize the community to be more interested in using the assets belonging to the regions in their activities and to visit the regions where the acceptance of user charges for the use of the area has been very good.

Keywords: User charges for local wealth, effectiveness, efficiency.

Ketua

Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP . 196608201994022001

Anggota

Hj. Relasari, S.E., M. Si., Ak
NIP . 197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP . 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Elita Pratama

NIM : 01031381419213

Jurusan : Akuntansi

Judul : Analisis Atas Prosedur Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 24 April 2018

Pembimbing Skripsi Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak NIP. 196608201994022001	Hj. Rela Sari, S.E., M. Si., Ak NIP. 197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M, Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Kayuagung, 23 Maret 1997
Agama	: Islam
Status	: belum Menikah
Alamat Rumah	: Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 09 RW. 02 Kel. Jakabaring Kota Palembang
Alamat Email	: Elitapratama123@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun Ajaran 2002 – 2008	: SD Negeri 92 Palembang
Tahun Ajaran 2008 – 2011	: SMP Negeri 31 Palembang
Tahun Ajaran 2011 – 2014	: SMA Negeri 15 Palembang
Tahun Ajaran 2014 - 2018	: Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

Kursus Akuntansi Prospek

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Bende Seguguk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasioanl.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 157 Bab VIII undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya yang dipisahkan, dan
    1) Hasil pajak daerah;
    2) Hasil retribusi daerah;
    3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    4) Lain-lain PAD yang sah;
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, secara umum terdapat 3 jenis Retribusi Daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kreteria – kreteria Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
2. Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.
3. Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).
4. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Dipungut secara efektif dan efeisien serta menjadi Pendapatan Daerah.
6. Kualitas dan pelayanan yang baik.

Jenis – jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persamahan / keberhasilan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,

6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Jenis – jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut pemeritah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

Kriteria dan ciri – ciri retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanannya diserahkan kepada daerah.
2. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegaiatan yang dilaksanakan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang di beri hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Palembang di harapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.

Di kota Palembang sendiri Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sangat umum dijumpai. Karena kebanyakan dari masyarakat di kota palembang memanfaatkan aset daerah yang berupa gedung pada saat ingin mengadakan acara pribadi maupun organisasi. Secara umum dapat kita ketahui jika banyaknya penyewaan aset daerah maka akan mendapatkan penghasilkan yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan PAD di kota palembang ini.

Dinas Pendapatan Kota Palembang sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak dan retribusi daerah kota/kabupaten. Retribusi Daerah sendiri cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah hal ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan, yang mana disebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota palembang

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	Target	Realisasi	Peningkatan (%)
2012	2.129.688.243.904,75	2.241.242.778.950,50	9,74
2013	2.662.178.061.424,70	2.608.332.965.204,88	13,18
2014	3.073.38.412.245,31	2.864.285.443.451,50	6,83
2015	2.859.503.907.463,85	2.694.157.998.605,44	3,85
2016	3.466.134.113.873,28	3.092.823.209.524,18	8,57

Sumber: Badan Pengelolaan pajak Daerah Kota palembang.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, penerimaan yang ditargetkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebesar Rp. 2.129.688.243.904,75 pada tahun 2012 lalu meningkat menjadi Rp. 2.662.178.061.424,70 di tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 3.073.389.412.245,31 setelah itu pada tahun 2015 menurun menjadi Rp. 2.859.503.907.463,85 dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi Rp. 3.466.134.113.873,28. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota palembang mempunyai arti bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah kota atas semua pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yaitu salah satunya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yang mempunyai andil didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2015 efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah tetap efektif dari tahun sebelumnya. Di Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah juga ekektif karena target yang di tentukan dapat tercapai.

Tabel 1.2

Target Dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Palembang

Tahun 2012 samapi dengan Tahun 2016

Tahun	Target	Realisasi	Peningkatan (%)

2012	262.500.000,00	242.000.000,00	92,19
2013	264.000.000,00	217.500.000,00	82,39
2014	277.000.000,00	186.000.000,00	67,15
2015	277.000.000,00	331.000.000,00	119,49
2016	277.000.000,00	165.000.000,00	59,57

Sumber:Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Palembang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah di kota Palembang sebesar Rp. 242.000.000,00 pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 217.500.000,00, kemudian pada tahun 2014 menurun kembali menjadi Rp. 186.000.000,00 setelah itu pada tahun 2015 meningkat menjadi 331.000.000,00dan pada tahun 2016 semakin menurun kembali menjadi Rp. 165.000.000,00. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum efektif dan efesien dalam setiap tahunnya. Karena pada tahun 2012, 2013 dan 2014 retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target, namun pada tahun 2015 penerimaan meningkat sehingga dapat mecapai target. Tetapi, pada tahun 2016 menagalami penurunan kembali dan menyebabkan tidak tercapaianya target.

Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Palembang. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang perlu dilakukan evaluasi dan analisis realisasi retribusi

daerah dan penggalian yang sudah dilakukan. Analisis tersebut dapat mencangkup penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Dengan analisis efektivitas dan efesiensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dijadikan bahan evaluasi penggalian pendapatan asli daerah kota Palembang, yaitu pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan di lakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pemungutan Retribusi kekayaan Daerah telah dilakukan sesuai dengan prosedur?
2. Apakah penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah dilakukan secara efektif dan efesien oleh Badan pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas , maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah dilakukan sesuai prosedur.

2. Untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota palembang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penerimaan retribusi daerah, khususnya masukan bagi pemerintah kota Palembang di Badan pengelolaan Pajak Daerah (BPPD.

2. Manfaat Praktisi

   a. Bagi Peneliti

      Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dikota palembang.

   b. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penerimaan retribusi daerah, khususnya masukan bagi pemerintah kota Palembang di Badan pengelolaan Pajak Daerah (BPPD).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab akan dibagi beberapa sub bab yang disusun secara

sistematis sehiggan menggambarkan keterkaitan antara satu sub bab dengan sub bab yang lain. Lima bab ini secara garis besar tersusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yanng berhubungan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu mengenai : pendapatan asli daerah dan retribusi. Retribusi mencangkup defensisi, jenis-jenis, sifat, objek, subjek, perhitungan dan tarif retribusi. Selain teori, bab ini juga akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan data yang telah dikumpulkan seputar prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ditraik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV dan akan diberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Fatchania, Meutia. 2007. *Analisi Efesiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : UII

Gomies, Stevanus J Victor Pattisina. 2011. *Analisi Konstribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, Volume 13 No. 2, Asset September 2011*.

Marsyahrul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.

Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 04 Tahun 2009. *Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.*

Siahaan, P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sajadi, Nur Alimin. 2014. *Efektifitas Metode Inkuiri dalam Meningkatkan Problem Solving Pokok Bahasan Lingkaran di SMP Negeri 1 Gempol Cirebon*. Skripsi tidak diterbitkan. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati

Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia*"

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "*Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta : Direktorat Jendral Otonomi Daerah*"

www.landasanteori.com./2015/07/*pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan.html?m=1*.di akses jumat 27 Oktober 2017

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang "*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*"

Hanif, Nurcholis.2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.*

Siahaan, Marihot P, S.E. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*